

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran hasil analisis data dan interpretasi penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, rasio ketergantungan daerah dan *dummy variabel* pemberlakuan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2022, maka dapat disimpulkan:

1. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berhubungan positif serta berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat. Hubungan positif ini menandakan bahwa kenaikan pada PDRB akan ikut meningkatkan IPM di Provinsi Sumatera Barat.
2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berdasarkan hasil pengujian berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat, baik secara simultan maupun parsial. Hasil pengujian variabel ini selaras dengan hipotesis penelitian. Peningkatan pada pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan nilai IPM di Provinsi Sumatera Barat.
3. Variabel rasio ketergantungan daerah berdasarkan pengujian dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat.
4. Variabel *dummy* Pemberlakuan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah berkorelasi secara positif serta bila ditinjau secara simultan dan parsial memberi pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan IPM pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kualitas SDM di Provinsi Sumatera Barat.

## 5.2 Saran

1. Dalam hal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pemerintah daerah perlu meningkatkan produktivitas masyarakat. Sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya akan memicu percepat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan IPM di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan anggaran pendidikan, peran penting pemerintah daerah adalah mengoptimalkan dan meningkatkan pengeluaran pada sektor pendidikan untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Peningkatan anggaran pendidikan akan berdampak besar pada IPM di Provinsi Sumatera Barat.
3. Rasio ketergantungan daerah yang besar terhadap dana pemerintah pusat yang ditransfer kepada daerah tentunya tidaklah baik. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus berupaya menurunkannya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan sumber daya daerah secara maksimal sehingga dapat meningkatkan pemasukan bagi daerah.
4. Pada penelitian ini pengembangan variabel yang digunakan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan adanya kelanjutan penelitian secara lebih mendalam terkait faktor lainnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga hasil penelitian yang didapatkan akan semakin lengkap serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk berbagai pihak yang membutuhkan penelitian terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut terdapat pada penggunaan data IPM dengan dua metode yang berbeda. Dimana pada data tahun 2010-2022 menggunakan penghitungan IPM metode baru yang diterapkan pada tahun 2010. Sedangkan data tahun 2005-2009 menggunakan perhitungan metode lama. Perbedaan antara metode baru dengan lama terletak pada

penggunaan komponen-komponen perhitungan IPM yang tidak dapat dikonversikan, sehingga data tersebut tidak bisa dibandingkan secara langsung dan selaras. Oleh sebab itu, hal ini perlu untuk dipertimbangkan sebagai keterbatasan dalam penelitian yang telah dilakukan.

